

**IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI
KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2013**

JURNAL



OLEH :
BIMA GHAFARALIE
NIM 080563201006

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2015**

IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2013

BIMA GHAFARALIE

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fisip UMRAH, Bima.ghafa@gmail.com

ABSTRAK

Pada dasarnya penyediaan tempat tinggal atau rumah di Indonesia adalah kewajiban perseorangan, negara dalam hal ini membantu akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar perumahannya secara adil dan merata. Faktanya ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki kemampuan cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik hunian dalam lingkungan sosial ekonominya. Sebagian Pemerintah Daerah telah menangani sektor perumahan dan pemukiman sebagai salah satu prioritas pembangunannya. Umumnya kegiatan diarahkan pada stimulasi perbaikan rumah tidak layak huni. Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun melakukan fasilitasi penguatan program dan kelembagaan termasuk menyediakan bantuan fasilitas Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan pemukiman melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Adapun kajian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini memuat model yang didalamnya terdapat empat variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, diantaranya adalah Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Sedangkan pada analisa data, yang digunakan peneliti didalam penelitian ini adalah menggunakan teknik Deskriptif Kualitatif.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mewakili masyarakat sebagai orang yang wajib mendapatkan informasi tentang bantuan dari pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berjumlah 11 orang. Camat di Kantor Camat Kecamatan Teng dijadikan sebagai Informan kunci, serta masyarakat yang mendapat bantuan program RLTH sebanyak 10 orang. Dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dari program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Teng sudah terlaksana, ini dilihat dari jawaban yang diberikan atas pertanyaan kepada informan.

Dari hasil penelitian ini, pada variabel komunikasi dalam pemberian informasi agar lebih ditingkatkan. Serta lebih adanya peningkatan kinerja staf, terutama yang diberikan kewenangan dalam melaksanakan perintah dalam program RTLH tersebut.

Kata Kunci : Implementasi, Program, Rumah layak huni

ABSTRACT

Basically the provision of shelter or home in Indonesia is the duty of the individual, the state in this case helping people access to basic needs in a fair and equitable housing. In fact there are some people who do not have enough ability to meet the physical needs of occupancy in the socio-economic environment. Most of the regional government has been handling the housing and settlement sector as one of its development priorities. Generally, the activities aimed at stimulating repair uninhabitable houses. Karimun District Government facilitation and institutional strengthening programs, including providing assistance facility Facility and Utility (PSU) housing and settlements through programs Houses Not Livable (RTLH).

The study that researchers use in this study contains a model in which there are four variables that greatly affect the successful implementation of a policy, including the Communications, Resource, Disposition and Bureaucratic Structure. While the data analysis, the researchers used in this research is using qualitative descriptive technique.

Informants were selected in this study are the ones who represent the community as a person who shall obtain information about the support of the implementation of the program Houses Not Livable (RTLH) a total of 11 people. Camat in the District Head Office Tebing serve as key informants, and people who received assistance RTLH many as 10 people. From the analysis it can be concluded that the implementation of aid programs Houses Not Livable (RTLH) in District Tebing has been implemented, is seen from the answers given to the question of the informants.

From these results, the communication variables in the provision of information is enhanced. As well as over an increase in staff performance, particularly given the authority to execute commands in the RTLH program.

Keywords: Implementation, Program, Habitable houses

PENDAHULUAN

Indonesia telah menetapkan dalam pasal 28 H Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pada amandemen ke 4, bahwa setiap orang memiliki hak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menghuni rumah yang layak berarti pengakuan status legal kependudukan yang membuka identitas sosial, akses pada program peningkatan kesejahteraan serta peluang usaha yang membutuhkan kredibilitas hunian.

Pada dasarnya penyediaan tempat tinggal atau rumah di Indonesia adalah kewajiban perseorangan, negara dalam hal ini membantu akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar perumahannya secara adil dan merata. Faktanya ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki kemampuan cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik hunian dalam lingkungan sosial ekonominya. Sebagian Pemerintah Daerah telah menangani sektor perumahan dan pemukiman sebagai salah satu prioritas pembangunannya. Umumnya kegiatan diarahkan pada stimulasi perbaikan rumah tidak layak huni. Pemerintah Daerah

Kabupaten Karimun melakukan fasilitasi penguatan program dan kelembagaan termasuk menyediakan bantuan fasilitas Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan pemukiman.

Visi yang saat ini menjadi dasar kegiatan dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 - 2009 mengamanahkan ketersediaan rumah layak huni bagi seluruh keluarga. Artinya, rumah sebagai kebutuhan dasar tidak selalu dipenuhi melalui kepemilikan. Artinya, jaminan penghunian harus diperluas dan diperjelas menjangkau penghunian atas dasar kepemilikan, sewa, kontrak, dan pola lain yang disepakati oleh para pemangku kepentingan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dan pasal 28 H Amandemen ke 4 UUD 1945, bahwa rumah adalah salah satu hak dasar rakyat dan oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, rumah juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai

pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan tarat hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa.

Sebagaimana tertera pada Peraturan Bupati (Perbub) Karimun Nomor 21 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Karimun Tahun 2012. Pasal 1 menyebutkan salah satu yang berkaitan erat dengan penelitian yaitu “Bantuan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah bantuan yang diberikan kepada penduduk miskin yang rumahnya tidak memenuhi standar kelayakan untuk dihuni, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupan secara wajar.

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan, sehubungan dengan Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun masih ditemui gejala-gejala sebagai berikut : Adanya penggunaan dana bantuan yang diterima oleh masyarakat yang kurang sesuai dengan yang telah ditetapkan, ketepatan waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan yang ditetapkan dan masih banyaknya pekerjaan yang sampai saat ini belum terselesaikan dikarenakan

kurangnya sarana dan prasarana serta ada keluhan-keluhan dari masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas peneliti tertarik untuk mencoba melakukan penelitian lebih jauh tentang fenomena yang terjadi dalam sebuah usulan penelitian dengan judul sebagai berikut:

“Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Tahun 2013”.

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini kedalam perumusan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Tahun 2013?”.**

Dari perumusan masalah yang akan diangkat pada penelitian ini, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karimun khususnya di Kecamatan Tebing
- b. Untuk mengetahui faktor kendala dalam Program Rumah Tidak Layak

Huni (RTLH) Kabupaten Karimun khususnya di Kecamatan Tebing .

Setelah dilakukan penelitian ini, diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan/manfaat sebagai berikut :

- a. Untuk penerapan ilmu yang telah peneliti pelajari khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Negara.
- b. Untuk memberikan informasi/masukan bagi Kabupaten Karimun Dinas Sosial dan pihak Kecamatan Tebing dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Karimun untuk masa yang akan datang.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang mengangkat masalah yang sama.

KERANGKA TEORITIS

Menurut George C. Edward III (1980:10) mengemukakan ada empat dimensi yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu :

1. *Communication*

For implementation to be effective, those whose responsibility it is to implement a decision must know what they are supposed to do. Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and

they must be clear, accurate, and consistent. If the policies decisionmakers wish to see implemented are not clearly specified, they may be misunderstood by those at whom they are directed.

Komunikasi Untuk implementasi efektif, orang-orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan harus tahu apa yang mereka lakukan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus ditransmisikan kepada personil yang 4 tepat, dan mereka harus jelas, akurat, dan konsisten. Jika kebijakan pengambil keputusan ingin melihat dilaksanakan tidak jelas ditentukan, mereka mungkin disalahpahami oleh orang-orang di siapa mereka diarahkan.

2. *Resources*

No matter how clear and consistent implementation orders are and no matter how accurately they are transmitted, if the personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementation will not be effective. Important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation: the authority to ensure that policies are carried out as they are intended: and facilities (including buildings, equipment, land, and supplies) in which or with which to provide services.

Sumber-sumber Tidak peduli seberapa jelas dan konsisten perintah pelaksanaan berada dan tidak peduli seberapa akurat mereka ditransmisikan, jika personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kekurangan sumber daya untuk melakukan pekerjaan yang efektif, implementasi tidak akan efektif. Sumber daya penting termasuk staf dari ukuran yang tepat dan dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan memadai tentang bagaimana menerapkan kebijakan dan kepatuhan lain yang terlibat dalam pelaksanaan: untuk memastikan otoritas bahwa kebijakan yang dilakukan sebagai mereka dimaksudkan: dan fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan perlengkapan) di mana atau yang dapat digunakan untuk menyediakan layanan.

3. *Dispositions*

The dispositions or attitudes of implementers is the third critical factor in

our approach to the study of public policy implementation. If implementation is to proceed effectively, not only must implementers know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. Most implementers can exercise considerable discretion in the implementation of policies. One of the reasons for this is their independence from their nominal superiors who formulate the policies. Another reason is the complexity of the policies themselves. The way in which implementers exercise their discretion, however, depends in large part upon their dispositions toward the policies. Their attitudes, in turn, will be influenced by their views toward the policies per se and by how they see the policies affecting their organizational and personal interests.

Disposisi (Kecenderungan-kecenderungan) Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan kami untuk mempelajari implementasi kebijakan publik. Jika implementasi adalah untuk melanjutkan efektif, tidak hanya harus pelaksana 5 tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi mereka juga harus berkeinginan untuk melaksanakan kebijakan. Kebanyakan pelaksana dapat menerapkan kebijaksanaan yang cukup besar dalam pelaksanaan kebijakan. Salah satu alasan untuk ini adalah kemerdekaan mereka dari atasan nominal yang merumuskan kebijakan. Alasan lain adalah kompleksitas dari kebijakan itu sendiri. Cara di mana pelaksana menerapkan kebijaksanaan mereka, bagaimanapun, tergantung sebagian besar pada disposisi mereka terhadap kebijakan. Sikap mereka, pada gilirannya, akan dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap kebijakan dan dengan bagaimana mereka melihat kebijakan yang mempengaruhi kepentingan organisasi dan pribadi mereka.

4. *Bureaucratic Structure*

Even if sufficient resources to implement a policy exist and implementers know what to do and want to do it, implementation may still be thwarted because of deficiencies in bureaucratic structure. Organizational fragmentation may hinder the coordination necessary to implement successfully a complex policy requiring the cooperation of many people,

and it may also waste scarce resources, inhibit change, create confusion, lead to policies working at cross-purposes, and result in important functions being overlooked.

Struktur birokrasi Bahkan jika sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan yang ada dan pelaksana tahu apa yang harus dilakukan dan ingin melakukannya, implementasi mungkin masih dapat digagalkan karena kekurangan dalam struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghalangi koordinasi yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan yang berhasil kompleks yang membutuhkan kerja sama dari banyak orang, dan juga dapat buang sumber daya yang langka, menghambat perubahan, menciptakan kebingungan, menyebabkan kebijakan bekerja di lintas tujuan, dan menghasilkan fungsi penting yang diabaikan.

KONSEP OPERASIONAL

Yang dimaksud dengan konsep operasional adalah penjabaran lebih lanjut tentang gejala yang diteliti dan dikelompokkan dalam variable penelitian, adapun konsep operasional digunakan untuk mempermudah dan menjelaskan gejala-gejala yang diteliti, disamping itu juga untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian konsep tersebut dengan masalah yang diteliti. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi dapat diukur dengan :
 - a. Transmisi
 - b. Kejelasan

- c. Konsistensi
- 2. Sumber-sumber dapat diukur dengan :
 - a. Staf
 - b. Informasi
 - c. Wewenang
 - d. Fasilitas
- 3. (Disposisi) Kecenderungan-kecenderungan dapat diukur dengan :
 - a. Pengangkatan Birokrat
 - b. Insentif
- 4. Struktur Birokrasi dapat diukur dengan :
 - a. Standard Operation Procedures (SOP)
 - b. Fragmentasi

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat Deskriptif Kualitatif, yaitu berupaya menggambarkan suatu fenomena yang diteliti secara apa adanya di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah di Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, penulis memandang bahwa masalah tersebut sangat menarik mengingat bahwa Program

RTLH merupakan program yang sangat berdampak terhadap pengentasan rumah tidak layak huni di Daerah Kabupaten Karimun tersebut.

Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini karena dari Kabupaten Karimun terdapat beberapa kecamatan yang mendapatkan bantuan RTLH di Kabupaten Karimun, diantara beberapa kecamatan tersebut terdapat salah satunya yang bantuan RTLH mendapat banyak masalah yaitu Kecamatan Tebing. Dalam hal ini membuat peneliti untuk mengetahui bagaimana Implementasi program RTLH tersebut.

3. Responden

Dalam penelitian ini tidak menggunakan istilah populasi dan sampel melainkan menggunakan istilah responden. Responden dalam hal ini adalah seluruh masyarakat yang mendapat program RTLH. Adapun *informan key* dalam penelitian ini adalah camat di Kantor Kecamatan Tebing dan masyarakat yang mendapatkan bantuan program RTLH yaitu sebanyak 11 orang.

4. Jenis Dan Sumber Data

a. Data primer

Data utama yang terjaring langsung dari responden, berkaitan

dengan realitas yang ada di Kecamatan Tebing, yaitu menyangkut Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni.

b. Data sekunder

Data yang berfungsi sebagai pelengkap, yang bisa diperoleh dari berbagai sumber, seperti data Monografi Kecamatan Tebing, informasi dari masyarakat setempat serta bahan-bahan laporan atau arsip-arsip surat dan dokumen-dokumen yang tersedia pada instansi terkait. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementerian-kementerian, hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, studi histories, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan Camat di Kecamatan Tebing sebagai *key informen*.

5. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.

Dalam metode ini penulis menyusun suatu daftar pertanyaan secara sistematis mengenai Implementasi Pelaksanaan Program RTLH di Kabupaten Karimun (Studi di Kecamatan Tebing Tahun 2013). Wawancara ini dilakukan dengan memberikan kebebasan menjawab sepanjang yang ia ketahui, tetapi tidak menyimpang dari masalah penelitian. Alatnya adalah pedoman wawancara. Pedoman wawancara ini ditujukan kepada informasi kunci dan masyarakat sebagai responden.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa pengumuman, memo, instruksi, majalah, buletin, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat atau peraturan Desa tentang disiplin, dan berita yang disiarkan media massa. Maka metode dokumentasi adalah pengumpulan data

dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang Implementasi Program RTLH Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.

c. Observasi

Cara pengumpulan data ini adalah dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal yang diamati, banyaknya periode observasi yang perlu dilakukan dan panjangnya waktu pada setiap periode observasi tergantung kepada jenis data yang dikumpulkan . Apabila observasi itu akan dilakukan pada sejumlah orang, dan hasil observasi itu akan digunakan untuk mengadakan perbandingan antar orang-orang tersebut, maka sebaiknya observasi terhadap masing-masing orang dilakukan dalam situasi yang relative sama.

6. Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik Deskriptif Kualitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dilapangan dalam bentuk kualitatif

dan diberikan penjelasan-penjelasan/ kesimpulan dengan menggunakan pernyataan-pernyataan atau kalimat yang dapat memberikan gambaran di lapangan tentang Implementasi Program RTLH di Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. Analisa kualitatif adalah yang tidak menggunakan model matematik, model statistik dan ekonometrik atau model tertentu lainnya setelah itu akan didapatkan jawaban tentang bagaimana implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. Peneliti disini menggunakan dengan teknik Purposive Sampling, Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut

dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Nugroho (2003-158) mengatakan bahwa implementasi adalah : “Cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut“.

Guntur Setiawan (2004:39) mengemukakan implementasi atau pelaksanaan adalah: “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”.

Menurut Hanifah Harsono (2002:67) menyatakan bahwa “Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program”.

B. Kebijakan

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Menurut Fredrickson dan Hart kebijakan adalah: “Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan/mewujudkan sasaran yang diinginkan (dalam Tangkilisan, 2003:12).”

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan

C. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik,

Maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut.

Menurut George C. Edward III (1980:10) mengemukakan ada empat dimensi yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi.
2. Sumber-sumber
3. Disposisi (Kecenderungan-kecenderungan).
4. Struktur Birokrasi.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158). Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk

program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah bagaimana suatu kebijakan atau program yang telah dibuat atau disahkan oleh pembuat kebijakan atau pemerintah dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan baik, sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat terealisasi dan terlaksana dengan baik. Pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting, bahkan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan yang telah dibuat akan sekedar berupa impian atau rencana yang bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan atau dilaksanakan. Terdapat beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan dalam suatu implementasi atau yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan.

Penulis disini mengacu pada model implementasi kebijakan yang berspektif *top down* yang dikembangkan oleh George C. Edward III (dalam Agustino, 2008 : 149-154) yang menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : 1. Komunikasi; 2. Sumberdaya; 3. Disposisi; 4. Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu :

a) Transmisi;

Dari hasil tanggapan responden tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa, komunikasi dari Kantor Camat Tebing ini sudah terlaksana dan masyarakat berharap informasi tersebut benar-benar sampai ketangan masyarakat. Dan hasil wawancara dengan *key informen* yaitu Camat di Kantor Camat Tebing mengatakan bahwa penyaluran komunikasinya sudah berjalan dan sudah terlaksana, sehingga

pelaksanaan program bantuan ini dapat berjalan dengan lancar.

Dilihat atas hasil wawancara masyarakat dan Camat selaku *key informen* dapat disimpulkan bahwa komunikasinya sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun dari pihak kecamatan dalam penyaluran komunikasi masih harus ditingkatkan. Karena apabila komunikasi ini tidak terlaksana akan menghasilkan kurang pemahaman atau berdampak tidak baik seperti membingungkan masyarakat. Hal ini juga dilakukan agar terciptanya hasil yang baik dalam pelaksanaan program dari pemerintah.

b) Kejelasan;

Dari tanggapan responden penulis menyimpulkan bahwa, pemberian informasinya sudah berjalan dan sudah terlaksana. Dimana pemberian informasi ini pelaksanaannya secara langsung dengan masyarakat. Tapi sebagian masyarakat menekankan agar penyampaian informasi masalah dana yang diberikan dapat diberitahukan agar tidak adanya atau terciptanya perselisihan antar masyarakat atau pelaksana. Dan hasil wawancara dengan *key informen* yaitu Camat di Kantor

Camat Tebing disimpulkan bahwa pemberian informasi tentang pelaksanaan bantuan ini sudah berjalan dan juga sudah terlaksana dan tidak membingungkan masyarakat. Pemberian ini juga dilakukan secara langsung kepada masyarakat dari pelaksana.

Jawaban dari responden dan Camat selaku *key informen* dapat disimpulkan pelaksanaan dari pemberian informasi sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya serta sudah lancar. Namun tahapan-tahapan dalam pemberian informasi mesti menyeluruh harus diberikan secara jelas. Agar dari masyarakat tidak lagi merasa bingung dari pelaksanaan bantuan ini.

c) Konsistensi;

Dari tanggapan responden penulis menyimpulkan bahwa, dalam komunikasi atau informasi yang berupa perintah sudah berjalan dan sudah terlaksana. Pelaksanaannya pun sesuai dengan yang diperintahkan dan tidak membingungkan masyarakat. Hasil wawancara dengan *key informen* yaitu Camat di Kantor Camat tebing dapat disimpulkan bahwa perintah yang diberikan dalam pelaksanaan program

bantuan ini sudah benar dan jelas serta sudah konsisten sesuai yang diterapkan.

Penulis menyimpulkan dari jawaban masyarakat selaku responden dan Camat sebagai *key informen* bahwa dalam pemberian perintah dalam program ini sudah jelas dan konsisten. Sehingga tidak membingungkan masyarakat, dann sudah terlaksana dengan baik pula. Dan juga dilaksanakan sesuai kebijakan yang ditetapkan.

2. Sumber daya

Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

a) Staf;

Dari tanggapan responden penulis menyimpulkan bahwa kinerja dan kemampuan staf yang menjadi pelaksana sudah memadai dan berjalan dan sudah terlaksana. Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informen* yaitu Camat di kantor Camat Tebing penulis menyimpulkan bahwa kinerja staf sudah memadai, ketersediaan staf yang berkompeten didalam pelaksanaan ini juga sudah tersedia dan berjalan dan terlaksana sebagaimana mestinya.

Jadi jawaban responden dan Camat selaku *key informen* dapat disimpulkan dalam pemahaman pelaksana sudah berjalan dan terlaksana, ketersediaan pegawai pun sudah memadai. Namun dari pihak kecamatan mesti memperhatikan lagi kinerja pegawai yang bertugas dalam pelaksanaan bantuan ini, agar dari masyarakat tidak berfikir negatif atas ketidadaannya para staf yang bertugas selaku pelaksana.

b) Informasi;

Dari tanggapan responden penulis menyimpulkan bahwa informasi yang dijalankan sudah terlaksana dan sesuai dengan arahan dan berjalan sebagaimana mestinya. Dan hasil wawancara dengan *key informen* yaitu Camat di kantor Camat Tebing disimpulkan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan sudah berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bedasarkan jawaban dari responden dan Camat sebagai *key informen* dapat disimpulkan bahwa, informasi yang diberikan untuk melaksanakan suatu kebijakan sudah berjalan dan terlaksana serta sesuai dengan aturan. Sehingga

pelaksanaan dari program ini berjalan lancar dan sesuai yang diharapkan.

c) Wewenang;;

Dari tanggapan responden penulis menyimpulkan bahwa kewenangan sudah bersifat formal sehingga perintah dapat dilaksanakan. Namun masyarakat disini masih belum banyak melihat pelaksana bekerja secara menyeluruh. Hasil wawancara dengan *key informen* yaitu Camat di kantor Camat Tebing dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program bantuan ini sudah sebagaimana mestinya, disini kewenangnya pun sudah bersifat formal guna terlaksananya perintah-perintah yang sesuai dengan kebijakan.

Dilihat dari keseluruhan jawaban responden dan Camat sebagai *key informen* dapat disimpulkan bahwa dalam kewenangan yang diberikan kepada pegawai selaku pelaksana kebijakan sudah bersifat formal. Dan dalam pelaksanaannya sudah dilaksanakan setara dengan kebijakan. Sehingga tercapainya program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebut, dan tidak menimbulkan penyelewengan kewenangan atas pelaksana.

d) Fasilitas;

Dari tanggapan responden dapat disimpulkan bahwa fasilitas pendukung dan fasilitas fisik yakni staf sudah memenuhi standard dan memadai. Namun disini kinerja staf agar lebih ditingkatkan, agar masyarakat tidak beranggapan negatif atas pekerjaan mereka. Hasil wawancara dengan *key informen* yaitu Camat di kantor Camat Tebing dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang diberikan kepada staf memang benar ditujukan pada staf yang mengerti betul dengan pelaksanaan program tersebut. Staf yang bertugas sebagai pelaksanapun mencukupi dan sudah berjalan dengan baik.

Mengacu dari jawaban responden dan Camat sebagai *key informen* dapat disimpulkan bahwa dalam ketersediaan pegawai sudah mencukupi, para pelaksana yang diberikan tugas pun sudah paham dan yang berkompeten dalam program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini. Sehingga dapat mencapai hasil yang baik dalam pelaksanaan kegiatan ini.

3. Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah

disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Goerge C.Edward III (dalam Agustino, 2008:152-154), adalah :

a) Pengangkatan birokrat;

Dari tanggapan responden dapat disimpulkan bahwa pelaksana program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sudah sesuai prosedur dan tepat sasaran. Sehingga yang benar-benar pantas mendapat bantuanlah yang mendapat bantuan dari program tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informen* yaitu Camat di kantor Camat Tebing dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program bantuan ini pelaksana sudah bekerja sesuai arahan atau perintah yang diberikan. Sehingga tidak akan menimbulkan hambatan-hambatan nyata yang bisa membuat pelaksanaan tidak berjalan dengan lancar atau tidak tercapainya suatu kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan dari jawaban masyarakat selaku responden dan Camat sebagai *key informen* dapat disimpulkan bahwa tidak adanya hambatan-hambatan nyata yang bisa membuat pelaksanaan dari program maupun

kebijakan atas pelaksanaan ini menjadi tidak lancar. Kelayakan penerima juga diperiksa dan sudah tepat sasaran dalam pemilihan siapa yang berhak dan tidak berhaknya dalam penerimaan bantuan Rumah Tidak Layak huni (RTLH) ini.

b) Insentif;

Dari tanggapan responden dapat disimpulkan bahwa memanipulasi insentif sebagai pendorong atau penunjang para pelaksana baik untuk dilakukan, karena bertujuan baik dalam pencapaian suatu kebijakan. Hasil wawancara dengan *key informen* yaitu Camat di kantor Camat dapat disimpulkan bahwa dalam memanipulasi insentif sebagai pendorong atau penunjang para pelaksana sudah dilakukan dan sudah terlaksana dengan semestinya.

Dilihat dari jawaban masyarakat selaku responden dan Camat sebagai *key informen* dapat disimpulkan bahwa memanipulasi insentif ini baik dilakukan, cara ini dilakukan untuk menunjang dan lebih mendorong pelaksana dalam kualitas kerja pastinya. Hal ini juga telah terlaksana. Namun sebagian masyarakat belum bisa menanggapi dengan baik, dikarenakan belum mengerti atau paham atas kejelasan

dari memanipulasi insentif tersebut. Sehingga masih menjadi pertentangan.

4. Struktur birokrasi

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan :

a) *Standar Operating Prosedures* (SOPs);

Dari tanggapan responden dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang memungkinkan para pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sudah terlaksana dan sesuai aturan yang diberikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informen* yaitu Camat di kantor Camat Tebing dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan baik dalam pelaksanaanya dan sudah sesuai dari standar kebijakan yang ditetapkan.

Mengacu dari jawaban seluruh responden yakni masyarakat dan Camat selaku *key informen* penulis menyimpulkan bahwa sudah adanya aturan ataupun prosedur-prosedur dan petunjuk teknis disini. Dan hal ini sudah berjalan juga sudah terlaksana sebagaimana mesti. Proses pelaksanaan ini juga demi kepentingan

masyarakat dan tercapainya program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

b) Fragmentasi;

Dari tanggapan responden penulis menyimpulkan bahwa sudah ada jangkauan koordinasi yang efisien dan efektif dalam pencapaian proses pelaksanaan program ini. Namun sebagian masyarakat hal berkaitan dengan ini lebih diperhatikan, agar tidak mempersulit masyarakat dalam proses pemenuhan sebagai penerima. Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informen* yaitu Camat di kantor Camat Tebing dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas dalam pelaksanaan ini sudah efisien dan efektif. Proses pelaksanaan dari program ini juga berjalan dengan lancar, dan tidak menerima keluhan atau mempersulit masyarakat.

Mengacu dari jawaban masyarakat sebagai responden dan Camat selaku *key informen* dapat disimpulkan kalau jangkauan koordinasinya sudah berjalan dan terlaksana, sehingga efektif dan efisien dalam proses kemudahan bentuk pelaksanaan kebijakan serta pencapaian keberhasilan dari program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bagian-bagian terdahulu, khususnya mengenai hasil-hasil yang didapat penulis, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun sudah mulai berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator dalam dimensi yaitu sebagai berikut :

a. Dalam variabel komunikasi, pada indikator transmisi, kejelasan dan konsistensi sudah terlaksana. Pemberian informasi atau tentang komunikasi dari pihak pelaksana atau kepada masyarakat sudah sangat memadai dan sebagaimana mestinya. Bentuk penyampaian komunikasi disini dilakukakn secara langsung dengan masyarakat, dimana masyarakat yang mendapat bantuan dikumpulkan atau dihadirkan di kantor Kecamatan Tebing untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan program bantuan ini. Hal ini dilakukan dengan baik, dilakukannya hal inipun untuk tercapainya program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pastinya

agar mendapatkan respon positif dari masyarakat, tetapi disini masyarakat masih berharap agar pelaksanaan dari program ini atau interaksi para pelaksana dalam pemahaman komunikasi lebih ditingkatkan lagi.

b. Disini sumber daya dikatakan sudah terlaksana dan tersedia serta sudah berjalan dengan lancar, dimana pada indikator fasilitas, kewenangan dan informasi mendapat respon positif dari masyarakat. Sumber daya pada staf pun terlaksana dengan adanya tenaga pendukung serta sarana prasarana yang membuat program ini berjalan dengan lancar.

c. Dilihat dari variabel disposisi dikatakan sudah lancar dan bagus, indikator-indikator pendukung dalam disposisi ini juga berjalan dan sudah terlaksana. Bentuk sikap pelaksana dalam pelaksanaan ini mendapatkan respon positif dari masyarakat, dimana mereka bekerja dan melaksanakan tugas sesuai dengan perintah. Terpenting dalam variabel ini guna untuk menunjang tercapainya pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

d. Untuk struktur birokrasi dapat dinilai sudah terlaksana, indikator dalam struktur birokrasi disini pun berjalan dengan baik. *Standar Operating Procedures* (SOPs) inipun terlaksana dalam pelaksanaan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dan sudah terlaksananya indikator-indikator dalam struktur birokrasi ini, dapat dilihat dari pernyataan masyarakat bahwa pelaksanaan ini tidak mempersulit dan memberatkan pihak masyarakat.

B. SARAN-SARAN

Menindak lanjuti beberapa permasalahan yang dihadapi oleh kantor Camat Tebing dalam pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan tebing Kabupaten Karimun sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian terdahulu mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis perlu memberikan beberapa saran dan masukan untuk ditujukan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam melaksanakan kegiatan program pelaksanaan Rumah Tidak Layak huni (RTLH) ini. Beberapa saran yang penulis berikan dalam pelaksanaan ini, yaitu sebagai berikut :

a. Kantor Kecamatan Tebing diharapkan lebih bisa meningkatkan lagi penyampaian informasi atau bentuk dari komunikasi kepada masyarakat. Agar masyarakat mendapatkan kejelasan dan mengerti proses pelaksanaan program ini, sehingga tidak menimbulkan pemikiran-pemikiran negatif atau salah persepsi pada masyarakat.

b. Dalam tahapan sumber daya, diharapkan staf yang bertugas atau yang diberikan kewenangan dalam pengurusan bantuan ini ditingkatkan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Karena masyarakat disini membutuhkan interaksi terhadap pelaksana, guna mendapatkan kejelasan atau benar-benar tahu proses dari program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diberikan kepada mereka. Hal ini disrankan agar masyarakat banyak tidak memberikan respon negatif dan terus bertanya-tanya keberadaan jawaban dari pertanyaan mereka.

c. Dalam variabel disposisi yang mesti ditingkatkan yakni pemahaman dari pemberian insentif, agar dari masyarakat tidak berfikiran negatif ketika itu diberlakukan terhadap pegawai atau pelaksana dari kegiatan.

d. Dilihat dari struktur birokrasi ini, hal yang paling diutamakan agar ditingkatkan yaitu peninjauan kelokasi atau uji kelayakan dari penerima bantuan, hal ini mesti lebih diperhatikan agar dari masyarakat banyak tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap pelaksana. Dan juga keaktifan pelaksana saat bertugas sebagai pelaksana dari kegiatan, hal ini dilakukan agar pencapaian kebijakan tercapai dan tidak membuat masyarakat beranggapan bahwa pelaksana tidak bekerja secara baik dan tidak menyeluruh.

Dari saran-saran yang telah penulis kemukakan diharapkan dapat menjadi masukan yang berarti bagi kantor Camat Tebing Kabupaten Karimun dalam pelaksanaan program Rumah Tidak Layak huni (RTLH). Diharapkan dapat memperbaiki mutu dan efektifitas Kinerjanya agar program kerja dari pelaksanaan bantuan kepada masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Tebing semakin membaik dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Edwards III, George C, 1980 *Implementing Public Policy. USA : T.S. Eliot*
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Nugroho Riant, 2003, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Gramedia, Jakarta
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung:Remaja Rosdakarya Offset.
- Tangkilisan, 2003, *Kebijakan* . Jakarta:Media Pesada
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Media Pressindo,
- _____ 2007. *Kebijakan Publik, Teori Dan Proses*. Edisi Revisi. Jakarta:PT.Buku Kita